

Implementasi Program Angkutan Siswa Trans Serasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Angkutan Siswa Gratis di Kabupaten Tabanan

**Dewa Ayu Dwi Wira Utami¹⁾, Ketut Winaya²⁾, Putu Eka
Purnamaningsih³⁾**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Udayana

Email : dewaayudwi20@gmail.com¹, ketutwinaya14@yahoo.com²,
eka.ningsih81@yahoo.co.id

ABSTRACT

One form of public service needed by the public is public transport services. But this time, in Tabanan regency that public transportation tends to be abandoned by the public due to the low level of service provided by the government. Seeing the condition of urban transport services is decrease, affecting students who prefer to use motorcycles when they go to school instead of using urban transport. The increasing number of students who ride motorcycles cause higher number of traffic violations and accident rates. Responding to the phenomenon, the Department of Transportation Tabanan District providing free school transportation called Trans Serasi which target the school students, especially junior high school students in Tabanan regency. This research was conducted using descriptive qualitative data collection techniques such as in-depth interviews. The indicators used to discuss the results of the research is (1) communication indicators, (2) resource indicators, (3) disposition indicators, and (4) indicators of bureaucratic structures which is used to view the Implementation of Trans Serasi Transportation Program in Tabanan District. The results of this study indicate Trans Serasi in Tabanan regency is still not running optimally. It is seen from the four indicators that only communications indicators that have been implemented properly, while the indicators of resources, dispositions, and bureaucratic structures are still not running maximally

Keywords: *Implementation, Service, Transportation of Trans-Serasi Student*

1. PENDAHULUAN

Transportasi peranan terpenting dalam langkah kegiatan, aktivitas, dan segala penunjang kebutuhan dasar masyarakat. Meliputi kegiatan dasar seperti pertanian, perekonomian, perindustrian, pariwisata merupakan suatu kegiatan yang sangat melibatkan transportasi. Hal tersebut seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, sehingga tuntutan kualitas transportasi publik menjadi desakan tersendiri bagi pemerintah. Kabupaten Tabanan Provinsi Bali memiliki beberapa persoalan mengenai transportasi publik salah satunya terjadi atas dasar jumlah kendaraan pribadi di Kabupaten Tabanan ialah 305.838 unit yang didominasi oleh sepeda motor yang berjumlah 270.428 unit (BPS 2013). Jumlah tersebut semakin bertambah setiap tahunnya, sehingga pelanggaran akibat siswa sekolah yang menggunakan kendaraan pribadi semakin meningkat pula. Akibat dari pelanggaran tersebut banyaknya kecelakaan melibatkan siswa sekolah. Masalah lain mengenai banyaknya transportasi pribadi yang digunakan oleh siswa sekolah yakni terbatasnya lahan parkir pada setiap sekolah. Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum menjadi salah satu faktor yang mendasari berbagai masalah transportasi di Kabupaten Tabanan. Bermula dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Pasal 138 ayat (2) menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum dan pasal 139 ayat (1) menetapkan bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib menjamin dan bertanggung jawab terhadap penyediaan layanan angkutan umum yang berkualitas, aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau dan keputusan peraturan kementerian direktur jenderal perhubungan darat nomor: SK.967/AJ.202/DRJD/2007 tentang penyelenggaraan angkutan sekolah. Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Perhubungan mengeluarkan program angkutan siswa Trans Serasi (Sejahtera Aman dan Berprestasi) pada tahun 2014.

Angkutan Kota (ANGKOT) Kabupaten Tabanan sudah beberapa tahun belakangan “mati suri”, karena tidak ada lagi kegairahan dirasakan oleh awak dan pengusaha ANGKOT Kabupaten Tabanan serta tidak adanya penumpang bahkan menyebabkan beberapa trayek menghilang dari peredaran. Angkutan siswa bisa menjadi alternatif dan bahkan bisa menjadi cikal bakal usaha Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mempertahankan, membuat kajian strategis untuk memulihkan kondisi ANGKOT Kabupaten Tabanan yang “mati suri” tersebut. Sayangnya Program Angkutan Siswa ini masih membatasi layanannya kepada Tiga SMP yang ada di Tabanan, yakni SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3

Tabanan sebagai layanan utama dikarenakan ketiga sekolah tersebut memiliki jumlah siswa yang paling banyak.

Untuk menunjang pelaksanaan angkutan siswa Trans Serasi ini dilakukan empat kali perjalanan yakni keberangkatan sekolah pagi, keberangkatan sekolah siang, penjemputan siswa sekolah pagi, dan penjemputan sekolah siang. Adapun jumlah armada yang dioperasikan sampai tahun 2016 ialah 80 angkutan kota, cukup efektif untuk pelayanan 3 sekolah tersebut.

Tabel 1.2 Jumlah Kecelakaan dan Jumlah Penumpang Angkutan Siswa Trans Serasi tahun 2014-2016 di Kabupaten Tabanan

N O	Jumlah Penumpang & Kecelakaan	2014	2015	2016	2017 (target)	2021 (target)
1	Jumlah Penumpang	125,419	616,684	789,654		
2	Load Factor	102.78%	89.15%	104.1%	100.0%	90.0%
3	Jumlah Kecelakaan	23	13	2	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten

Tabanan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penumpang angkutan siswa dari tahun ke tahun semakin meningkat dikarenakan tingginya antusiasme siswa untuk menggunakan layanan ini. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah penumpang pada

tahun 2014 ialah 125.419 siswa, tahun 2015 616.684 siswa dan pada tahun 2016 jumlah penumpang sebanyak 789.654 siswa. Adapun jumlah kecelakaan yang terdapat di tabel merupakan kecelakaan yang melibatkan siswa sekolah.

Adanya program angkutan siswa ini tentunya dapat mengurangi tingkat kecelakaan dan pelanggaran yang melibatkan siswa sekolah, namun dalam pelaksanaannya program ini masih saja ditemukan kendala yang dihadapi seperti jumlah armada yang masih kurang dikarenakan tingginya antusiasme siswa dalam menggunakan layanan ini sehingga banyak angkutan yang mengangkut siswa melebihi kapasitas akibatnya siswa menjadi kurang nyaman dan keselamatan siswa menjadi kurang terjamin. Kedua, belum meratanya pelayanan yang diberikan terutama kepada sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan dan tidak adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang menjadi landasan terlaksananya program ini sehingga seringkali menimbulkan keraguan dari pramudi (sopir) angkutan siswa Trans Serasi. Ketiga, angkutan yang belum diremajakan yang nantinya akan berakibat angkutan kota tersebut menjadi plat pribadi dan tidak bisa digunakan untuk mengangkut penumpang umum.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Pengertian kebijakan ini menurut Kartasasmita dalam Widodo (2012:12) merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam Winarno (2014:36) adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
- c. Tahap Adopsi Kebijakan
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Definisi mengenai pelayanan publik diuraikan menurut Agung Kurniawan dalam Pasolong (2014:128) yang mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kepmen PAN Nomor 58 tahun

2002 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, salah satunya yaitu :

- a) Jenis Pelayanan Jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan angkutan darat, laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran.

Edward III (dalam Widodo, 2012:97) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, diartikan sebagai keberhasilan capaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi

berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.

b) Sumber Daya, merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya (resources) manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

2. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan lainnya ialah sumber daya anggaran atau dana yang diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Hal

tersebut menyebabkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan itu. Di samping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan implementor terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Sumber Daya Peralatan (Fasilitas)

Sumber daya lainnya yang tak kalah penting demi mengukur keberhasilan suatu kebijakan ialah fasilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisien dan tidak mendorong motivasi para pelaku pasar dalam melaksanakan kebijakan.

c) Disposisi, diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai

kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

- d) Struktur Birokrasi, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang.

Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah: melakukan *Standar Operasional Prosedures* (SOPs) dan melaksanakan *Fragmentasi*. Angkutan Siswa Trans Serasi merupakan program pelayanan angkutan kota gratis untuk siswa. Program ini menjadi jalan keluar karena merupakan pilihan yang sangat baik bagi para orang tua siswa maupun siswa sendiri untuk berangkat dan pulang sekolah dengan aman, nyaman, dan selamat serta tanpa biaya jika dibandingkan dengan pilihan diantar oleh orang tua dan menggunakan sepeda motor sendiri oleh siswa terutama siswa SMP. Inovasi yang menyebabkan

program ini spesial adalah karena melalui program ini, angkutan kota di Tabanan memiliki 2 trayek, yaitu:

1. Trayek utama yang merupakan trayek dasar pelayanan penumpang umum dari terminal atau lokasi asal ke terminal atau lokasi tujuan.
2. Trayek Angkutan Siswa Trans Serasi yang merupakan deviasi atau penyimpangan trayek utama yang melayani siswa dari zona asal perjalanan siswa melalui kantong – kantong penumpang siswa ke dan dari sekolah pada jam berangkat dan pulang sekolah baik sekolah pagi maupun sekolah siang.

Konsep angkutan sekolah ini juga akhirnya diadopsi oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan untuk menjadi konsep yang diberi nama “Tabanan Konsep” dan “dijual” kepada daerah lain sebagai contoh penerapan angkutan kota dan angkutan siswa sekaligus. Keberhasilan program ini juga menyebabkan Tabanan ditunjuk menjadi pilot project pertama program baru Rute Aman Selamat Sekolah pada tahun 2015 karena dinilai berhasil menyediakan layanan angkutan yang meningkatkan keselamatan siswa dan diberi bantuan sarana prasana senilai 2,3 Miliar Rupiah serta bantuan 3 unit bus.

Program ini menjadi program yang memiliki konsep baru dimana

penyelenggaraan angkutan kota dan angkutan sekolah atau angkutan siswa diselenggarakan sekaligus dengan memanfaatkan angkutan kota yang ada dimana angkutan kota memiliki 2 trayek. Konsep ini spesial karena tidak perlu pengadaan kendaraan atau bus khusus untuk angkutan sekolah, dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan awak angkutan, serta meningkatkan keselamatan siswa sekaligus. Pola pikir yang selama ini berjalan secara nasional adalah, angkutan sekolah harus dengan bus sekolah yang memerlukan biaya pengadaan bus yang nilainya cukup besar serta tidak efektif karena waktu diam bus atau angkutan khusus sekolah memiliki waktu diam yang cukup lama dimana selain mengantar berangkat dan pulang sekolah, kendaraan khusus dimaksud hanya diam menunggu.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Basrowi (2008:21) bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat atau lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Angkutan siswa Trans Serasi. Penulis pilih sebagai Unit analisis, alasan dipilihnya angkutan siswa Trans Serasi sebagai unit analisis karena

merupakan obyek yang diteliti secara fokus dan mendalam oleh peneliti.

Informan pada penelitian ini ialah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, Kepala sekolah SMP N 1, SMP N 2, SMP N 3 Tabanan, orang tua siswa, serta sejumlah siswa-siswi di SMP 1, SMP 2, dan SMP 3 Tabanan, dan pramudi (supir) angkutan siswa Trans Serasi.

4. HASIL PEMBAHASAN

Program angkutan sekolah atau angkutan siswa di Tabanan diberi nama Angkutan Siswa Trans Serasi. Program ini menjadi jalan keluar sebagai langkah awal menurunkan tingkat penggunaan sepeda motor bagi siswa SMP dan menekan angka kecelakaan dan pelanggaran yang melibatkan siswa sekolah. Program ini sudah dilaksanakan mulai bulan Oktober tahun 2014. Operasional angkutan kota untuk siswa atau angkutan siswa merupakan bagian dari sistem terpadu angkutan umum yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama pihak terkait dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Operasional trayek angkutan siswa Trans Serasi memiliki 12 trayek untuk angkutan kota sebagaimana telah ditentukan jam berangkat dan pulang sekolah pagi serta jam berangkat dan pulang sekolah siang, daerah-daerah yang dilalui Trans Serasi,

serta pelayanan yang gratis yang diberikan kepada siswa.

Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan ke dalam 4 (empat) aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yakni implementasi kebijakan yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagaimana yang ungkapkan oleh George C. Edward III.

1. Komunikasi

Dengan membangun komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dan target sasaran nantinya diharapkan dapat membantu keberlangsungan program ini dalam jangka waktu yang lama. Seperti komunikasi yang terlaksana antara Dinas Perhubungan dengan pihak sekolah dimana komunikasi dari Dishub sendiri disaat mensosialisasikan adanya program ini yakni dengan mendatangi sekolah-sekolah yang menjadi pelayanan Trans Serasi. Selain memberikan sosialisasi Dishub juga memberikan pembinaan kepada siswa akan pentingnya menggunakan angkutan umum dibanding menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, Dishub juga setiap bulannya meminta jadwal sekolah atau kalender akademik agar bisa menyesuaikan pelayanan yang akan diberikan kepada siswa yang juga sekaligus mendata siswa agar bisa menentukan trayek-trayek yang akan dilalui Trans Serasi. Komunikasi dilanjutkan dari

pihak sekolah kepada orang tua siswa terkait sosialisasi program Trans Serasi yang dilakukan secara tatap muka langsung melalui rapat komite yang diadakan sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi sudah berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan kunci utama dalam pelaksanaan suatu program, baik itu sumber daya manusia yang merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan, sumber daya anggaran yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan maupun sumber daya peralatan (fasilitas) yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi pelaksanaan kebijakan yang akan memudahkan dalam memberikan pelayanan. Sumber daya yang terjadi dalam pelaksanaan Trans Serasi sendiri belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dilihat dari keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas yang dimana dalam pelaksanaan program ini ketiga hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Seperti yang terjadi misalnya keterbatasan SDM yang mengakibatkan masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum diberikan pelayanan Trans Serasi ini baik yang dipertanian maupun dipedesaan dikarenakan kendala dari SDM yang mengharuskan menempatkan banyaknya

pegawai di pos pemberangkatan maupun pos induk. Selain itu anggaran juga merupakan salah satu kendala dimana masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum dilayani Trans Serasi mengingat pelayanan yang diberikan kepada siswa secara gratis dan juga mengakibatkan terjadinya kendala seperti masih kekurangan armada yang digunakan untuk mengoperasikan Trans Serasi sendiri. Jadi dalam pelaksanaan Trans Serasi ini sendiri dalam indikator sumber daya masih belum berjalan dengan maksimal.

3. Disposisi

Sikap pelaksana dari implementor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan implementasi program dimana implementor terlibat secara langsung. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan perilaku dari pelaksana kebijakan yang berperan penting untuk mewujudkan implementasi yang sesuai dengan sasaran dan tujuan. Terlepas dari disposisi atau sikap dari pelaksana untuk melaksanakan program angkutan siswa Trans Serasi ini masih belum berjalan dengan optimal karena saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang belum dilayani Trans Serasi, armada yang digunakan sebagai operasional program Trans Serasi sendiri masih kekurangan. Selain itu armada yang digunakan merupakan angkutan yang sudah berumur tua yang masih belum bisa diremajakan yang mengakibatkan rentannya

kerusakan pada mobil dan tidak diperbolehkannya untuk memperpanjang trayek angkutan umum yang padahal tujuannya dari program ini ialah untuk memberikan pelayanan transportasi umum yang efektif kepada masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Meskipun sumber-sumber daya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Namun, implementasi program bisa jadi masih belum efektif karena ada ketidak efisiensi struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan variabel yang tidak kalah penting yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu struktur birokrasi ini dibedakan menjadi dua macam yakni elemen SOP dan elemen fragmentasi. Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan program Trans Serasi sendiri dalam pembagian tugas dan tanggung jawab sudah berjalan dengan baik dan juga struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program ini cukup sederhana antara pucuk pimpinan dengan bawahan sehingga koordinasi yang dilakukan pun cukup mudah. Namun dalam elemen SPM masih terdapat kendala yang dimana SPM menjadi tolak ukur didalam

memberikan pelayanan dikarenakan pelaksanaan program ini masih jauh dari harapan dari SPM yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dalam indikator struktur birokrasi yang terjadi dalam pelaksanaan Trans Serasi masih lemah.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program angkutan siswa Trans Serasi di Kabupaten Tabanan belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dilihat dari keempat indikator yang dimana hanya indikator komunikasi yang sudah terlaksana dengan baik, sedangkan indikator sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih belum berjalan secara maksimal.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- _____, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Abdulkadir, Muhammad. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Arikunto. Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (cetakan ke-14)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Abdullah, Syukur, 1988. *Laporan temu kajian posisi dan peran ilmu administrasi Negara dan manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation
- Basrowi, M. dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- _____, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta :

(CAPS) Center of Academics
Publishing Service

Warpani, Suwardjoko P. 2002.
*Pengelolaan lalu lintas dan
angkutan jalan*. Bandung:
Penerbit ITB

Karya Tulis Ilmiah, Dokumen, dan Jurnal.

Craig B. Howley, Aimee A. Howley,
Steven Shamblen dalam
jurnal Research in Rural
Education. *Riding the School
Bus: A Comparison of the
Rural and Suburban
Experience in Five States*".

Crystal Cook dan Douglas Shinkle,
National Conference of State
Legislatures (2012)
*.Transportation Review
School Bus Safety*.

Surya Shandra Setiawan dan Weni
Rosdiana, S.Sos., M.AP.
2015. *Evaluasi Program Bus
Sekolah di Kota Surabaya*.
Fakultas Ilmu Sosial dan
Hukum Universitas Negeri
Surabaya.

Uswatul Fitroh dan Fitrotun Niswah,
S.AP., M.AP. *Efektivitas
Pelayanan Angkutan. Bus
Sekolah Gratis oleh Dinas
Perhubungan Komunikasi*

Informasi Kota Blitar.
Fakultas Ilmu Sosial dan
Hukum Universitas Negeri
Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor :
SK.967/AJ.202/DRJD/2007
Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Sekolah.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

Internet

Tabanan.bps. 2015. Jumlah
Penduduk, Laju
Pertumbuhan, Kepadatan
Penduduk, dan Sex Ratio
Kabupaten Tabanan, 2010
dan 2015. Diunduh dari
<https://tabanankab.bps.go.id>
tanggal 13 Desember 2016
pukul 19.00 WITA

Tabanan.bps. 2013. Indikator
Geografis Kabupaten
Tabanan 2013. Diunduh dari
<https://tabanankab.bps.go.id>
tanggal 13 Desember 2016
pukul 19.00 WITA

Bali.bps. 2013. Banyaknya
Kendaraan Bermotor
Menurut Jenis Kendaraan
dan Kabupaten/Kota di Bali
Tahun 2013. Diunduh dari
<http://bali.bps.go.id> tanggal
26 Pebruari 2017 pukul
18.30 WITA

Dishubkominfo. 2015. Kabupaten
Tabanan Mendukung
Program Rute Aman
Sekolah. Diunduh dari
[http://dishubkominfo.tabana
nkab.go.id](http://dishubkominfo.tabanankab.go.id) tanggal 28
Pebruari 2017 pukul 08.50
WITA